



# LAPORAN KINERJA

BADAN KESATUAN BANGSA  
POLITIK KABUPATEN

**TAHUN 2022**

TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.. berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.. diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

Jember, Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Dr. EDY BUDI SUSILO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681214 198809 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	6
A. RENCANA STRATEGIS .....	6
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	8
C. PERJANJIAN KINERJA .....	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	12
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2022 .....	12
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	16
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	26
BAB IV. PENUTUP.....	32
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 (jika ada)</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan

pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 3 tahun 2022 sebagai berikut : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember, menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
  - \* Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - \* Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas, kelompok Jabatan Fungsional

- d.. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 22 ASN dan 12 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**berdasarkan Jabatan**  
**periode Januari-Desember 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Kepala Badan	1	
2.	Sekretaris	1	
3.	Kabid	4	
4.	Kasubbag Umum dan Kepegwaian	1	
5.	Perencana Ahli Muda	1	
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	5	
7.	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	1	
8.	Bendahara	1	
9.	Pengadministrasi Perencana dan Program	1	
10.	Pengadministrasi Umum	6	
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang**  
**periode Januari-Desember 2022**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	4
4	Penata Tingkat I	III/d	5
5	Penata	III/c	3
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
7	Pengatur Tingkat I	II/d	5
8	Pengatur	II/c	1
	<b>Jumlah</b>		<b>22</b>

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN dan Non ASN Badan Kesatuan**  
**Bangsa dan Politik**  
**berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**  
**periode Januari-Desember 2022**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD		ASN
2	SLTP		ASN
3	SMA/STM	8	ASN
4	D3	1	ASN
5	S1	9	ASN
6	S2	4	ASN
7	SD		Non ASN
8	SLTP	1	Non ASN
9	SMA/STM	7	Non ASN
10	D3		Non ASN
11	S1	4	Non ASN
12	S2		Non ASN
	<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	

## **E. ISU STRATEGIS**

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:

1. Penguatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat
2. Peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peranan masyarakat dalam proses demokrasi;
3. Peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam bidang politik.
4. Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitasi Kerjasama Ormas
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 dan tujuan ke 1 yaitu

- 1) Misi ke-2 : Membangun tata kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen Pembangunan Daerah lainnya
- 2) Tujuan ke-1 : Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen Pembangunan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten ke 10 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2021-2026**

- 4) Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan public.
- 5) Indikator Tujuan : Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan stabilitas politik di daerah	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100	100	100	100	100	100

Sumber data : tabel TC. 27 pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026

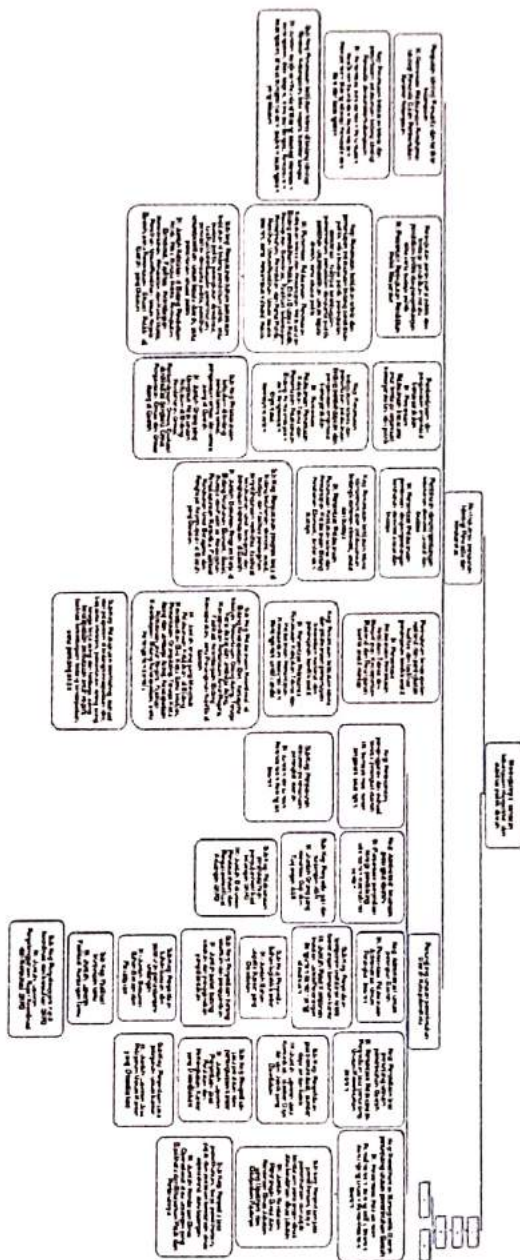
## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :



### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 065/03.01/35.09.415/2022 Tahun 2022;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indek Pelayanan Publik (IPP)	Prosentase pelayanan Bakesbangpol yang terlaksana	Bakesbangpol Kab Jember	Bakesbangpol Kab Jember

### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	100%

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung dengan anggaran program 6 tahun 2022 sebesar Rp 8.005.288.457,-(Delapan Milyar lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah)

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022**

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna *progress negative*, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

### **B.1 ANALISA REALISASI KINERJA**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) Tujuan, 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) indicator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan public.
- Sasaran 1 : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik di Daerah

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022**

4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indek Pelayanan Publik	100%	100%	100%

*Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (1) satu. indikator sasaran Indek Pelayanan Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik rata rata mencapai 100% dan masuk dalam kategori baik Dengan demikian maka secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indek Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%

*Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2026 berdasarkan target pada Rencana Strategis**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indek Pelayanan Publik	100%	100%	100%

*Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2022	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

*Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik*

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kualitas layanan pencegahan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan keindahan lingkungan

Sasaran Strategis 2 : Membina berbagai organisasi masyarakat untuk menguatkan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di tengah – tengah masyarakat melalui pelibatan pesantren, sekolah diniyah dan majelis taklim

## B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5  
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Sasaran 1 meningkatkan Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	100%				√			
Indikator 1.1 Prosentase konflik sosial di daerah (konflik) yang tertangani	100%				√			
Rata rata capaian	100%				√			

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kategori baik

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas dengan indicator prosentase konflik sosial di daerah (konflik) yang tertangani, adapun tingkat keberhasilan di tahun anggaran 2022 kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang dianggarkan dengan realisasi 98,89%. Kedepan untuk dapatnya lebih meningkatkan koordinasi dengan jajaran samping yang di dukung dengan anggaran karena di tahun 2023 akan dilaksanakan persiapan pemilu dan tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu.

### B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 didukung 6 (enam) Program 10 (sepuluh) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung**  
**Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	<b>Program</b> : Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	503.763.290	494.246.000	98,11
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	503.763.290	494.246.000	98,11
	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	503.763.290	494.246.000	98,11
	Input : Pembentukan dan Pelatihan Kader Bela Negara dalam rangka memperkuat ketahanan Bangsa			
	Output : Jumlah peserta yang mengikuti Pembentukan dan Pelatihan Kader Bela Negara			
	Outcome : Pembentukan dan Pelatihan Kader Bela Negara dengan peserta dari Perguruan Pencak Silat 217 orang			



2	<b>Program</b> :... Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.177.392.80 0	3.157.842.50 0	99,38
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	3.177.392.80 0	3.157.842.50 0	99,38

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan			
Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik....	3.177.392.80 0	3.157.842.50 0	99,38
Input : Terwujudnya kehidupan Demokrasi yang lebih berkualitas			
Output : Terlaksananya pemberian bantuan keuangan Partai Politik			
Outcome : Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan pada Partai Politik (11 Partai)			



3	<b>Program</b> :Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	67.586.900	62.061.000	91,82
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	67.586.900	62.061.000	91,82
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	67.586.900	62.061.000	91,82
	Input : Untuk mengetahui keberadaan Ormas terkait Legalitas dan dan kegiatannya			
	Output :Terwujudnya Sinergi dan Kolaborasi antara Pemerintah daerah dan Ormas			
	Outcome :Terlaksananya Forum Silaturahmi Ormas			



4	<b>Program</b> : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	92.462.700	92.460.900	100
	Kegiatan : erumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	92.462.700	92.460.900	100
	Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	92.462.700	92.460.900	100
	Input : Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya			
	Output : Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama			
	Outcome : Peningkatan kapasitas kerukunan umat beragama			





• Kegiatan Audiensi FPK dengan Bapak Bupati Jember



• Kegiatan Sarasehan Pancasila di SMAN 01 Jember

5	<b>Program</b> : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	269.580.300	266.474.700	98,85
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	269.580.300	266.474.700	98,85
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	134.624.500	131.654.700	97,79
	Input : Mengidentifikasi kegiatannya yang akan diukur kinerjanya			
	Output : Fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik			
	Outcome : Terselenggaranya Sarasehan Pancasila, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	134.955.800	134.820.000	99,90
	Input : Mengidentifikasi kegiatan yang akan diukur kinerjanya			
	Output : Fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik			

Outcome :Fasilitasi Monitoring Evaluasi  
pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini



- Kegiatan Sarasehan Kebangsaan bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda

#### B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya pelayanan public yang merata dan berkuwalitas	100 %	98,89	Efisien

Sumberdaya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjumlah 22 orang dengan rincian 7 orang pejabat struktural dan 6 orang fungsional dan 9 orang pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan... didukung anggaran sebesar **Rp. 503.763.290,- dan terserap sebesar Rp. 494.246.000,-**

Sumber daya di atas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rata- rata capaian **90 %**

#### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN (REALISASI ANGGARAN)

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 8.005.288.457,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember. Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 8.005.288.457,-.
2. Belanja Modal sebesar Rp 0

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai enam (6) program dan sepuluh (10) kegiatan, dua puluh (20) Sub. Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	<b>Program : Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>	503.763.290	494.246.000	98,11
1	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	503.763.290	494.246.000	98,11
	Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	503.763.290	494.246.000	98,11
	<b>Program : Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	3.188.439.800	3.157.842.500	99,38

2	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik	3.188.439.800	3.157.842.500	99,38
	Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3.188.439.800	3.157.842.500	99,38
	<b>Program : PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	67.586.900	62.061.000	91,82
3	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	67.586.900	62.061.000	91,82
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	67.586.900	62.061.000	91,82
	<b>Program : Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>	92.462.700	92.460.900	100
4	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	92.462.700	92.460.900	100
	Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	92.462.700	92.460.900	100

	Kepercayaan di Daerah			
	<b>Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	269.580.300	266.474.700	98,85
5	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	269.580.300	266.474.700	98,85
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	134.624.500	131.654.700	97,79
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan konflik di Daerah	134.955.800	134.820.000	99,90
	<b>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	3.894.502.467	3.843.166.972	98,68
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.990.000	75.005.956	97,42
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.990.000	75.005.956	97,42
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.376.639.207	3.369.667.046	99,78
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.151.339.207	3.149.837.580	99,95

	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	225.300.000	219.829.466	97,57
3.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.111.760	132.780.030	99,75
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.502.900	1.497.000	99,61
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.538.100	17.417.000	99,31
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.535.760	4.515.000	99,54
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.700.000	2.600.000	96,30
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	1.980.000	1.960.000	98,99
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.855.000	104.791.030	99,94
4.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.395.500	168.838.840	80,25
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.910.000	46.183.313	55,04
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.835.500	24.826.700	99,96
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.650.000	97.828.827	96,24
5.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.366.000	96.875.100	99,50
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.178.900	22.000.200	99,19

	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.187.100	74.874.900	99,58
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.005.288.457</b>	<b>7.916.252.075</b>	<b>98,89</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 sebesar Rp. 7.916.252.075,00 dari total anggaran Rp. 8.005.288.457,00 atau 98,89%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami *kenaikan* sebesar 14,91 % yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp. 8.936.060.916,00 terealisasi sebesar Rp 7.504.633.109,00,- atau 83,98%.

dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut : Sudah sesuai dengan yang di rencanakan.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain : Sasaran – sasaran pada tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) sudah sesuai dan dapat dilaksanakan lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan (**Baik**) karena dari 1(jumlah) indicator sasaran sebanyak 1 jumlah indicator pencapaiannya dalam kategori sangat baik, 1 jumlah 1 indicator dalam kategori baik.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp.7.916.252.072,- (98,89%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan (tidak ada) efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

### **B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN**

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan,

LAMPIRAN 1

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen Pembangunan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah	Penyelenggaraan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	12	13	14
											Membina berbagai Organisasi Masyarakat untuk menguatkan Ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan di tengah-tengah masyarakat	Penataan dan Penguatan Organisasi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN KESATUAN  
KABUPATEN JEMBER



DR. EDY BUDI SUSILO, M.Si  
Pemerintah Muda  
NIP. 19681214 198809 1 001



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ☐ 337853 Jember

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2022**

**RPJMD**

MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik *	Penyelenggaraan penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Merangkainya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Stabilitas Politik Daerah	Penyelenggaraan penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

TUJUAN OPD		SASARAN OPD		Indikator Sasaran	Target	PROGRAM			KEGIATAN		
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran			Uraian	Indikator Program	Target	URAIAN	Indikator Kegiatan (Output)	Target
Terciptanya Situasi dan Kondisi Masyarakat yang aman, tertip dan nyaman	Porsentase Konflik Sosial di Daerah (Konflik) yang tertangani	Jumlah Konflik sosial yang tertangani	Porsentase Konflik Sosial di Daerah (Konflik) yang tertangani	100%	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pemahaman dan Pelaksanaan Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Kebangsaan Pemahaman dan Pelaksanaan Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Karakter Kebangsaan	100%	Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Peningkatan Kader Bela Negara	100%	503.763.290,00
					2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat		Keg. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan siluasi Politik	Terselenggaranya sosialisasi peraturan tentang politik	100%	3.177.392.800,00
					3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	kerjasama antar lembaga organisasi kemasyarakatan dan po	100%	Keg. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terselenggaranya Forum Silaturahmi ormas	100%	67.586.900,00

				4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	100%	Keg. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Peningkatan Kapasitas Kerukunan Umat Beragama	100%	92.462.700,00
				5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan konflik sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial mantap	100%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	Terlaksananya Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat (FKDM)	100%	269.580.300,00
JUMLAH											4.110.785.990,00

Desember 2022  
**KEPALA BADAN KESETUAN BANGSA DAN POLITIK**  
  
 Dr. **FDY BUDI SUSILO, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19631214 199809 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen. S. Parman Nomor 89 ☎ 0331-337853 Jember

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si

Jabatan : Kepala Bakesbang dan Politik Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

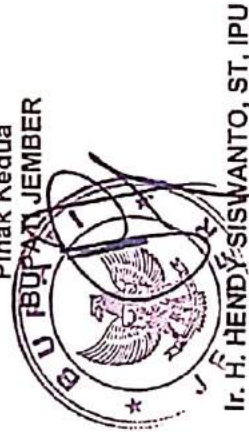
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 18 November 2022

Pihak Kedua  
BUPATI JEMBER



Pihak Pertama  
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER



Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si

Pembina Utama Muda

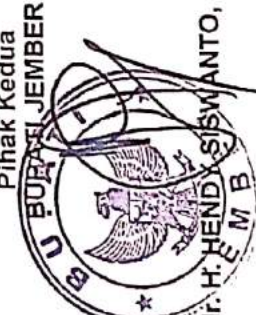
NIP. 19681214 198809 1 001


**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	Indek Pelayanan Publik (IPP)	100 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.894.502.467,-	PAPBD
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	503.753.290,-	PAPBD
3.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.177.392.800,-	PAPBD
4.	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	67.566.900,-	PAPBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	92.452.700,-	PAPBD
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	269.580.300,-	PAPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>8.005.268.457,-</b>	

Jember, 18 November 2022

Pihak Kedua  
  
**Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU**

Pihak Pertama  
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER**  
  
**DI. HEDY BUDI SUSILO, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19681214 198809 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S. Parman No. 59 Telp. 0331-337853 Jember

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/ 03.01 /35.09.415/2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/011.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 02/11.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/11.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyolenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

**KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember dalam :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

**KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

**KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Jember

pada tanggal: 3 Januari 2022

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER**



**Dr. H. EDY BUDI SUSILO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19691214 198809 1 001

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Jember
- Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Efektif melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik
- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Fungsi :  
a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;  
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;  
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;  
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja Utama 2	Penjelasan / Formulasi Penghitungan 3	Sumber Data 4	Penanggung Jawab 5
<p>1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban</p> <p>2. Memelihara kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan Bangsa (disintegrasi Bangsa) melalui gatra ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban</p>	<p>1. Prosentase konflik Sosial di Daerah (konflik) yang tertangani</p> <p>2. Prosentase pelanggaran hukum dan/atau HAM per tahun (kasus) yang tertangani</p>	<p>Jml konflik sosial yang tertangani : <math>Jml\ Konflik \times 100\%</math></p> <p>Realisasi th. Skrg : <math>Realisasi\ th\ sbim \times 100\%</math></p>	Bakosbangpol Kab. Jember	Bakosbangpol Kab. Jember